

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA
TARGET RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KOTA PALEMBANG**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH

**NAMA : ASWATI
NIM : 22 2008 049**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2012**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aswati

Nim : 22 2008 049

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Februari 2012

Penulis



(Aswati)

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK
TERCAPAINYA TARGET RETRIBUSI DAERAH
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA
PALEMBANG**

Nama : **Aswati**
NIM : **22 2008 049**
Fakultas : **Ekonomi**
Program Studi : **Akuntansi**
Mata Kuliah Pokok : **Akuntansi Sektor Publik**

**Diterima dan Disyahkan
Pada Tanggal.....**

Pembimbing



Muhammad Fahmi, S.E, M.Si
NIDN : 0029097804

Palembang, Maret 2012
a.n Dekan
Ketua Program Studi Akuntansi



Drs. Sunardi, S.E, M.Si
NIDN : 0206046303

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Motto :

“ Janganlah pernah menyerah jalani kehidupan ini, sebab hidup adalah anugerah, lakukan yang terbaik untuk hidupmu”

“Kegagalan bukanlah sebuah akhir, namun merupakan awal dari keberhasilan yang akan kita raih dimasa depan”

Kupersembahkan kepada:

- ❖ **Bapak dan Ibuku**
- ❖ **Saudara-saudaraku tersayang**
- ❖ **Pembimbing Skripsi**
- ❖ **Sahabatku terkasih**
- ❖ **Almamater**



PRAKATA

Asalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillahirobbil A'lamin segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Retribusi Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang”. Sholawat beserta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa hidayah dan penerangan bagi seluruh umat manusia di bumi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendo'akan dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bpk. Muhammad Fahmi, SE., M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ihklas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak H. M. Idris, SE., M.Si Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang



2. Bapak M. Taufiq Syamsudin, SE., M.Si. Ak Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Drs. Sunardi, SE., M.Si dan Ibu Welly, SE., M.Si Selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak M. Fahmi, SE., M.Si Selaku Pembimbing Akademik.
5. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmunya selama kuliah.
6. Ibu Dra. Hj. Sumaiyah. MZ., MM Selaku pimpinan beserta Staf dan Karyawan / Karyawati Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
7. Kedua Orang tuaku tersayang, Bapak dan ibu (Suharto dan Muryati) yang selalu memberikan do'a dan dukungannya.
8. Kedua adikku tersayang (Tuti Haryati dan Eka Ariadi) yang selalu memberikan do'a dan dukungannya.
9. Seseorang yang terkasih yang telah memberikan semangat dan do'anya.
10. Sahabat-sahabat seperjuanganku (Renia Amelia, Nur Handayani, Nurina Damayanti, Erriska Famella Jerry, Noprianti, Yuniarsih, Dwi nova, Indah Wijaya, Windu Hariyati) dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu semua angkatan 2008.
11. Sahabat-sahabat KKN ku angkatan 36 Pos Daya Tematik, karna kalian aku merasakan kebersamaan, kekeluargaan, dan mengerti artinya kesederhanaan.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, bimbingan, dan bantuan yang telah kalian berikan. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati

penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini

Akhir kata penulis mengharapkan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Penulis dan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

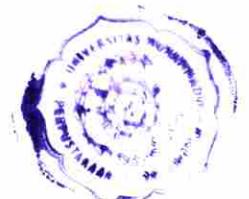
Palembang, Februari 2012

Penulis

Aswati

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	iv
HALAMAN PRAKATA	v
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8



BAB II	KAJIAN PUSTAKA.....	9
A.	Penelitian Sebelumnya	9
B.	Landasan Teori	10
1.	Retribusi daerah	10
a.	Pengertian retribusi daerah.....	10
2.	Jenis-jenis Retribusi Daerah	11
a.	Retribusi jasa umum	11
b.	Retribusi jasa usaha	12
c.	Retribusi perizinan daerah	14
3.	Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah.....	14
4.	Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya target retribusi daerah	16
BAB III	METODE PENELITIAN.....	17
A.	Jenis Penelitian	17
B.	Tempat Penelitian	17
C.	Operasional Variabel	18
D.	Data yang Digunakan	18
E.	Teknik Pengumpulan Data	19
F.	Analisis Data Dan Teknik Analisis	21

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	22
A. Hasil Penelitian	22
1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.....	22
2. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang....	23
3. Aktivitas Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang	32
4. Tugas Pokok, Visi, misi dan Sasaran Organisasi	34
B. Pembahasan Hasil Penelitian	44
1. Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya target Retribusi daerah.....	38
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	53
A. Simpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel I.1	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah..... 5
Tabel I.2	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Palembang..... 5
Tabel I.3	Jenis-jenis Retribusi Daerah Yang Tidak Mencapai Target Dalam Persentase Tahun 2007 s.d 2010..... 6
Tabel III. 1	Variabel, Definisi, dan Indikator yang digunakan..... 18
Tabel IV. 1	Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Palembang Tahun 2007..... 47
Tabel IV. 2	Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Palembang Tahun 2008 47
Tabel IV. 3	Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Palembang Tahun 2009 48
Tabel IV. 4	Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Palembang Tahun 2010..... 48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas Selesai Riset

Lampiran 2 Kartu Ativitas bimbingan

Lampiran 3 Sertifikat Mengaji

Lampiran 4 Sertifikat Toefl

Lampiran 5 Biodata

ABSTRAK

Aswati /222008049/2012/ Analisis Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Retribusi Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang / Akuntansi Sektor Publik.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan retribusi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Manfaat dalam penelitian ini adalah bagi penulis, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, dan Almamater.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Deskriptif. Variabel dalam penelitian ini adalah faktor penyebab tidak tercapainya target retribusi daerah. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan target retribusi adalah penerimaan target belum realistis, penentuan target didasarkan data historis, masih tingginya tingkat kebocoran, efektifitas pemberlakuan sanksi, kurangnya sarana dan prasarana, belum primanya layanan dan pengawasan, sumber daya manusia.

Kata Kunci : faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target retribusi daerah.

ABSTRACT

Aswati /222008049/2012/ The Analysis Factors Failure to Achiece Of Regional Retribution Revenue Of Regional Income Department in Palembang / Public Sektor Accounting.

The problem of study was to find what factors caused the failure in a chieving the retribution of Regional Income Departmen in Palembang. The benefits in this research is for the autor, for regional income department in Palembang, and for almamater.

This study was descriptive since the discussion was about the phenomena occurred on the study object. The data was primary and secondary data. The data were collected throught interview and documentation.

The resultof study demonstrated that the factors which caused the unrealistic formulation, the historial formulation target, the failure in achieving the acceptance retribution target were the high leakage level, the ineffective snction implementation, the lack of operational field, the ineffective controlling system and field, and human resourch

Key word : *factors failure to achiece of regional retribution revenue.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai tahun 2001 menuntut daerah untuk berupaya meningkatkan sumber yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pelaksanaan pembangunan secara mandiri dapat terlaksana apabila kontribusi dari PAD lebih besar dari pada sumber-sumber lainnya, oleh karena itu pemerintah daerah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yaitu dapat dilakukan dengan meningkatkan efektifitas pemungutan melalui pengoptimalan potensi yang ada dan terus berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan, sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel.

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia memasuki era baru seiring dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal. Dalam Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dimana pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan

peraturan daerah. Kewenangan pemerintah diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan biaya, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan tersebut. Konsekuensi logisnya sebagai daerah otonomi harus berusaha secara maksimal menghimpun berbagai sumber pendapatan Pendapatan Asli Daerah dengan lebih efektif.

Pada pemerintahan daerah pengurusan keuangan daerah juga diatur dengan membaginya menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus, dengan demikian Pemerintah Daerah terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pengurusan umumnya dan kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada pengurus khususnya. APBD adalah rencana pekerjaan keuangan (*financial werkplan*), yang dibuat untuk suatu jangka tertentu, dalam waktu mana badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (Kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rencana yang menjadi dasar (*gronslag*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran. APBD terkandung unsur pendapatan dan belanja, dimana pendapatan yang dimaksud adalah sumber-sumber penerimaan untuk daerah dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan belanja adalah pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang benar-benar berasal dari dalam kota Palembang sendiri yang diambil dari kekayaan sumber alamnya. Dimana unsur Pendapatan Asli Daerah

antara lain : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi hasil BUMD dan lain-lain PAD.

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ikut berperan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Sejalan dengan usaha pemerintah dalam meningkatkan pemungutan hasil retribusi dipekirakan kepada masyarakat dan dunia usaha dengan cara memenuhi pelayanan tersebut. Retribusi daerah harus dipungut, dikelola secara professional dan bertanggung jawab karena wewenang pemungutan, pengelolaan dan pembangunan dana retribusi sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Undang-undang No 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi yang di kelola oleh daerah sebagai sumber pendapatan daerah terdiri dari Komponen-komponen yang bersumber antara lain terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi jasa perizinan tertentu. Dalam pengumpulan sumber pendapatan ini terdapat faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target, salah satunya karena faktor belum primanya layanan karena terbatasnya sumber daya manusia atau tugas pelaksana lapangan, serta adanya birokrasi dalam layanan pemungutan retribusi.

Dinas Pendapatan Daerah merupakan dinas yang menerima dan mengawasi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Sesuai

dengan Undang-undang Peraturan Daerah Kota Palembang No 2 Tahun 2001 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi dinas daerah bahwa sub dinas penerimaan dan pendapatan lain-lain mempunyai tugas melaksanakan tugas penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain, penerimaan BUMD dan pendapatan lain-lain serta legalisasi pembukuan surat-surat berharga.

Kota Palembang sebagai bagian integral dari wilayah kesatuan Republik Indonesia perlu segera mengambil langkah-langkah proaktif dalam menyikapi tantangan dan peluang di Era Otonomi Daerah. Dengan demikian pemerintah kota Palembang harus dapat mengendalikan manajemennya dengan baik dalam mengawasi dan memantau sumber penghasilan dari pendapatan asli daerah, yaitu dengan meningkatkan berbagai jenis penerimaan retribusi daerah yang masih sangat rendah.

Untuk melihat dan membandingkan berapa besar penerimaan retribusi daerah sebagai data pendukung, berikut ini penulis akan menyajikan tabel target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah serta jenis-jenis retribusi daerah yang mengalami penurunan karena target yang tidak dapat terealisasi pada Dinas Pendapatan Kota Palembang selama 4 (empat) tahun terakhir.

Tabel I. 1
Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kota Palembang 2007 s/d 2010

uraian	2007		2008		2009		2010	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pajak Daerah	51.475.000.000,00	51.486.867.607,06	69.350.000.000,00	69.367.592.779,00	87.485.932.360,00	84.696.563.176,60	93.420.835.800,00	104.047.313.437,00
Retribusi Daerah	55.999.049.277,00	48.572.158.218,00	65.332.735.137,00	59.005.021.400,00	64.629.000.000,00	51.274.328.286,00	74.393.402.273,00	65.175.505.023,00
Pengelolaan Kekayaan Daerah	2.750.000.000,00	2.366.826.719,28	8.000.000.000,00	1.951.494.846,80	10.000.000.000,00	8.402.352.751,46	20.000.000,00	23.533.118.892,16
Lain-lain Pendapatan	21.325.035.465,20	39.702.466.760,13	29.632.539.011,00	41.009.442.525,97	56.477.729.450,00	28.167.404.947,67	22.235.219.188,57	62.437.716.881,50
Jumlah PAD	131.549.084.692,20	142.128.319.304,47	172.315.274.148,00	171.383.551.551,77	218.592.661.810,00	170.540.649.161,73	210.049.457.241,57	255.193.654.243,66

Sumber : Dispenda Kota Palembang, 2011

Tabel I. 2
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Palembang
Tahun 2007 s/d 2010

No	Tahun anggaran	Target	Realisasi
1	2007	55.999.049.277,00	48.572.158.218,00
2	2008	65.332.735.137,00	59.005.021.400,00
3	2009	64.629.000.000,00	51.274.328.286,00
4	2010	74.393.402.273,00	65.175.505.023,00

Sumber : Dispenda Kota Palembang, 2011

Tabel I.3
Jenis-jenis Retribusi Daerah Yang Tidak Mencapai Target
Dalam persentase Tahun 2007 s/d 2010

No	Jenis-jenis retribusi	Persentase (%) penerimaan retribusi daerah			
		2007	2008	2009	2010
1	Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat	52,27	87,62	73,87	59,67
2	Retribusi parkir ditepi jalan umum	56,99	68,18	61,51	65,25
3	Retribusi terminal	60,73	55,09	55,16	56,53
4	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	100,06	93,46	73,70	77,35
5	Retribusi penggantian biaya cetak peta	51,31	58,77	57,82	50,44
6	Retribusi pengolahan limbah cair	87,42	93,98	67,12	93,14
7	Retribusi persampahan / kebersihan	64,20	68,07	78,60	83,27
8	Retribusi usaha salon dan kecantikan	106,33	84,50	106,07	77,31

Sumber : Dispenda Kota Palembang, 2011

Berdasarkan tabel No 2 dapat dilihat penerimaan target Retribusi daerah kota Palembang tidak pernah tercapai dari tahun ketahun, dengan melihat pencapaian penerimaan retribusi daerah dalam kota Palembang, pada tahun 2007 target yang ditetapkan 55.999.049.277,00 hanya terealisasi 48.572.158.218,00 pada tahun 2008 target yang ditetapkan 65.332.735.137,00 hanya terealisasi 59.005.021.400,00 pada tahun 2009 target yang ditetapkan 64.629.000.000,00 hanya terealisasi 51.274.328286,00 pada tahun 2010 target yang ditetapkan 74.393.402.273,00 hanya terealisasi 65.175.505.023,00. Tidak tercapainya target terhadap penerimaan retribusi daerah ini disebabkan karena faktor pengendalian manajemennya, karena kurangnya peninjauan terhadap pemungutan retribusi

daerah kelokasi pantauan, sehingga persentase penerimaan retribusi daerah tidak pernah mencapai target.

Tidak tercapainya target ini dapat dilihat pada tabel 3 berdasarkan beberapa jenis retribusi yang tidak pernah tercapai targetnya yaitu sebagai penyebab turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana tidak tercapainya target retribusi daerah disebabkan salah satunya karena faktor proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang masih kurang efektif, karena yang berhak mengambil keputusan adalah tergantung dengan instansi yang terkait dalam penetapan target retribusi daerah Kota Palembang, sehingga keputusannya hanya bersifat sepihak dan bukan keputusan bersama dengan Dinas Pendapatan Kota Palembang.

Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah maka Pemerintah Kota Palembang diharapkan harus mampu menciptakan suasana yang harmonis dan menyenangkan serta menumbuhkan loyalitas bagi karyawan di dalam Dinas Pendapatan Daerah, dengan melakukan pengendalian terhadap kinerja perusahaan dan program kerja secara efektif untuk meningkatkan penerimaan retribusi yang mengalami penurunan sehingga pembangunan dapat berkembang dinamis. Oleh karena itu peneliti berkeinginan untuk mengangkat retribusi ini secara terinci berdasarkan jenis retribusi yang mengalami penurunan. berdasarkan hal tersebut diatas penulis mencoba untuk menuangkannya dalam bentuk penelitian yang berjudul : **Analisis Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Retribusi Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang .**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah : Apa faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui faktor penyebab tidak tercapainya penerimaan retribusi daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam disiplin ilmu khususnya dalam masalah retribusi daerah pada Kota Palembang.

b. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan, pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah pada Kota Palembang.

c. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dan perbandingan dalam penyusunan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul “Analisis Penerimaan Retribusi Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin”. Telah dilakukan oleh RA Martini Anggraini (2005) Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palembang. Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah apa faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan retribusi daerah yang di targetkan belum dapat terealisasi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan penerimaan retribusi daerah yang di targetkan belum dapat terealisasi pada Dinas Pendapatan Daerah, dan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah.

Variabel yang digunakan dengan idikator faktor internal dan faktor eksternal. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah bervariasi dari tahun ke tahun, sehingga penerimaan retribusi daerah pada

Kabupaten Musi Banyuasin ini belum terealisasi dalam penerimaan retribusi daerah.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah terdapat pada tempat penelitian, dimana tempat penelitian yang diteliti oleh peneliti sebelumnya dilakukan pada kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sedangkan tempat penelitian yang diteliti oleh penulis dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang retribusi daerah.

B. Landasan Teori

1. Retribusi Daerah

a. Pengertian retribusi daerah

Menurut Indra dan Gatot (2003:90) Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat, sesuai peraturan daerah yang berlaku

Menurut Abdul (2002:64) Retribusi merupakan penerimaan yang berasal dari kontribusi daerah.

Undang-undang No 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa :

- 1) Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi orang atau badan.
- 2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
- 3) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah yang bersangkutan.

Kesimpulan dari pengertian retribusi adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehubungan dengan jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan, baik langsung maupun tidak langsung.

2. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Adapun jenis-jenis retribusi daerah menurut Undang - Undang No 34 Tahun 2004 pasal 18 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001 Retribusi Daerah dibagi atas tiga golongan yaitu :

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Menurut Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2001 Tentang retribusi Daerah dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa jenis-jenis retribusi jasa umum adalah :

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan.
- 2) Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.
- 3) Retribusi pergantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akt catatan sipil.
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- 5) Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum.
- 6) Retribusi pelayanan pasar.
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- 9) Retribusi pergantian biaya cetak peta.
- 10) Retribusi pengujian kapal perikanan.

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa umum.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Menurut Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2001 Tentang retribusi Daerah dalam pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa jenis-jenis disebutkan bahwa jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah :

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- 2) Retribusi pasar grosir dan pertokoan.
- 3) Retribusi tempat pelelangan.
- 4) Retribusi terminal.
- 5) Retribusi tempat khusus parkir.
- 6) Retribusi tempat penginapan atau persinggahan atau villa.
- 7) Retribusi penyedotan kakus.
- 8) Retribusi rumah potong hewan.
- 9) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.
- 10) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- 11) Retribusi tempat penyebrangan diatas air.
- 12) Retribusi pengelolaan limbah cair.
- 13) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Subyek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan, subyek retribusi jasa usaha merupakan wajib retribusi jasa usaha, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayarn retribusi jasa usaha.

c. **Retribusi Perizinan Daerah**

Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, peraturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang retribusi Daerah dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah :

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan.
- 2) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol.
- 3) Retribusi izin gangguan.
- 4) Retribusi izin trayek.

Subyek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah, subyek retribusi perizinan tertentu yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran perizinan tertentu.

3. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah

Peraturan daerah No 1 tahun 2008 tentang pengelolaan retribusi mekanisme pemungutan retribusi adalah sebagai berikut:

a. Penetapan retribusi

Penetapan retribusi berdasarkan surat keterangan retribusi daerah (SKRD) , dalam hal ini jika SKRD tidak dipenuhi untuk wajib retribusi serat penentuan tarif retribusi ditetapkan untuk wali kota , apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemui data baru atau yang semua belum terungkap maka dikeluarkan SKRD tambahan.

b. Pemungutan retribusi

Retribusi di pungut berdasarkan Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan

c. Penagihan retribusi

Surat peringatan dikeluarkan apabila terjadi ketika akan mendapat jasa. Surat peringatan tersebut dikeluarkan setelah 7 hari sejak tempat pembayaran, dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

d. Penyetoran retribusi

Retribusi yang terkumpul dipegang oleh bendaharawan masing-masing dinas, dan kemudian bendahara penerima menyetorkan seluruh retribusi

ke Bank Sumsel melalui rekening Pemerintah Kota Palembang sehari setelah penagihan retribusi.

e. Pembukuan dan pelaporan

Pembukuan dilakukan sebagai bukti pelaporan bahwa jumlah retribusi yang disetor sama dengan jumlah atau ketentuan fasilitas yang telah di berikan atau digunakan.

4. Faktor-faktor Tidak Tercapainya Target Retribusi Daerah

Menurut Abdul (2002:49) dalam kajian tentang keuangan daerah pemerintah sumber-sumber keuangan daerah yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah yang dapat diterima oleh pemerintah daerah adalah belum optimalnya pajak dan retribusi daerah dimana penyebabnya karena faktor:

- a. Penerimaan target belum realistis, ini bisa dilihat dari:
 - 1) Sistem penentuan target yang didasarkan pada historis.
 - 2) Belum dimilikinya data based atau data dasar mengenai sumber penerimaan.
- b. Masih tingginya tingkat kebocoran atau kelolosan, ini dikarenakan:
 - 1) Belum efektifitasnya pemberlakuan sanksi
 - 2) Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional di lapangan
- c. Belum primanya layanan karena terbatasnya sumber daya manusi atau tugas pelaksanaan dilapangan, serta adanya birokrasi dalam layanan pemungutan pajak retribusi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2002:11), jenis penelitian menurut eksplanasinya terdiri dari :

1. Penelitian Deskriptif

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

2. Penelitian Komparatif

Yaitu penelitian yang bersifat membandingkan dua variabel atau lebih.

3. Penelitian Asosiatif

Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan berdasarkan tingkat eksplanasinya yaitu jenis penelitian deskriptif atau suatu penelitian yang bersifat menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target retribusi daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

B. Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi unit penelitian Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang beralamat di Jalan Merdeka No.21 Palembang.

B. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Faktor penyebab tidak tercapainya target retribusi daerah.	Suatu indikator yang menyebabkan target penerimaan retribusi daerah tidak terealisasi setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan target belum realistis - Penentuan target didasarkan data historis - Masih tingginya tingkat kebocoran - Efektifitas pemberlakuan sanksi - Kurangnya sarana dan prasarana - Belum primanya layanan dan pengawasan. - Sumber daya manusia

Sumber : Penulis, 2012

D. Data yang digunakan.

Menurut Nur dan Bambang (2002:146) data yang digunakan dalam penelitian dapat berupa :

1. Data Primer Data primer

Yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Berupa opini subyek (orang) secara individual,

kelompok, hasil observasi, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian-pengujian. Misalnya hasil kuisioner, hasil pengamatan, dan wawancara.

2. Data Sekunder

Yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Dalam penelitian ini data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan yaitu berupa wawancara langsung kepada pihak yang berwenang di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang pada bagian bagian umum dan administrasi, bagian penerimaan retribusi dan legeslisasi, antara lain:

- a. Pengendalian manajemen Dinas Pendapatan Daerah
- b. Gambaran umum tentang penerimaan retribusi daerah
- c. Tugas pokok dan fungsi setiap sub Dinas

Data sekunder yang digunakan yaitu :

- a. Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
- b. Laporan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.
- c. Laporan target dan realisasi Retribusi Daerah berdasarkan jenis retribusi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nan Lin Alih Bahasa W.Gulo (2002:115-123) teknik pengumpulan data yaitu:

1. Pengamatan (observasi)

Yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

2. Survei

Yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan instrument untuk meminta tanggapan responden tentang sample.

3. Wawancara

Yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden.

4. Kuisisioner (angket)

Yaitu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka akan memberi respon terhadap pertanyaan.

5. Dokumentasi

Yaitu catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Dimana wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak yang berwenang di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang pada bagian bagian umum, bagian pengolahan data, pada bagian penerimaan retribusi legelisasi, dan wawancara secara langsung pada Dinas Perhubungan sub bagian penerimaan retribusi yang dalam hal ini mewakili dinas yang lainnya.

Metode dokumentasi yang peneliti dapatkan dengan cara pengumpulan data melalui catatan dan literatur.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Menurut Nur dan Bambang (2002:146) menyatakan bahwa analisis data terdiri dari :

1. Analisis Data

a. Analisis Kualitatif

Yaitu analisis yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka dan dapat merupakan jawaban dari suatu peristiwa yang sulit diukur.

b. Analisis Kuantitatif

Yaitu analisis yang dapat dinyatakan dalam angka-angka dan dapat dihitung dengan rumus statistik.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif yaitu menganalisis dalam bentuk uraian yang ada untuk mendapat kejelasan terhadap suatu kebenaran, yaitu menganalisis faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi yang dilakukan atau di pungutoleh dinas pendapatan daerah dari berbagai dinas atau instansi yang terkait, antara lain beberapa retribusi salah satunya retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi parkir ditepi jalan umum, retribusi terminal, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi kebersihan, retribusi usaha salon dan kecantikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Bidang pajak dan retribusi pada daerah tingkat I dan II sebelum 1975 merupakan urusan bagian dari biro keuangan Pemerintah Daerah, masing-masing hal tersebut berlaku di Kota Palembang dengan mengacu kepada peraturan daerah (PERDA) tingkat I Palembang No 9 tahun 1975 tepatnya pada tanggal 11 November 1975. Peraturan ini merupakan landasan pembentukan Dinas Pendapatan Daerah bagi Kotamadya Palembang dengan status dan kedudukan sebagai aparat pelaksanaan Pemerintah Daerah yang bertempat di Kota Palembang. Serta memiliki tugas mengelola segala hal dibidang pendapatan daerah lainnya yang menjadi hak dan kewenangan Pemerintah Kota Palembang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan PERDA No 3 tahun 1980 dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Palembang yang struktur dan tata kerja organisasinya berlaku sama di seluruh Indonesia, yang kemudian disempurnakan kembali dengan No 3 tahun 1990. Seiring dengan berlakunya otonomi daerah, maka Dinas Pendapatan Daerah mengalami perubahan, baik dari segi tugas, fungsi serta struktur dan kedudukan sebagai realisasinya, maka pada tanggal 7 maret 2001 dikeluarkan

peraturan daerah Kota Palembang No 2 tahun 2001 tentang pembentukan kedudukan, dan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang mengacu atau sejalan dengan ketentuan peraturan pemerintah No 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang berlokasi di Merdeka No 21 Kecamatan Ilir Barat Palembang, wilayah kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang meliputi Kecamatan Ilir Barat II, Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Sako, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Kalidoni, Kecamatan Gandus, Kecamatan Bukit Kecil, Kecamatan Kertapati, Kecamatan Plaju, dan Kecamatan Kemuning.

2. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Berdasarkan peraturan daerah No 3 tahun 1980 dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Kota Palembang yang berstruktur organisasi dan tata kerjanya berlaku sama diseluruh Indonesia. Peraturan Daerah No 3 tahun 1980 tersebut disempurnakan kembali dengan Peraturan Daerah No 3 tahun 1990.

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas. Didalam melaksanakan tugasnya, kepala dinas dibawah lima sub dinas atau sub bagian, melainkan sebagian unit yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Sub dinas ini merupakan sub

bagian yang disebut seksi-seksi. Selain membawahi kelima sub dinas tersebut, kepala dinas juga membawahi bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional, cabang dinas, serta unit pelaksanaan dinas (UPTD). Berikut ini akan dipaparkan susunan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yaitu :

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian urusan perlengkapan, dan urusan umum.

Bagian tata usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- 2) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- 3) Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan.
- 4) Melaksanakan pengolahan umum, meliputi surat menyurat, kearsipan, dan penggandaan.

Bagian tata usaha tersiri dari :

- 1) Sub bagian umum mempunyai tugas mengurus surat menyurat.
- 2) Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.

- 3) Sub bagian keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran belanja dinas, mengurus pembukuan, dan kas serta membuat pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

d. Sub Dinas Program

Sub dinas program mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program di bidang pendapatan dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian, pengembangan pendapat serta mengadakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah

Sub Dinas Program mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja.
- 2) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.
- 3) Pengkajian dan pengembangan pemungutan pendapatan daerah.
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Sub Dinas Program terdiri dari :

- 1) Seksi penyusunan program dan penyuluhan mempunyai tugas menyusun rencana penerimaan dan program kegiatan rutin dan pembangunan.
- 2) Seksi pemantauan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian yang berhubungan dengan penerimaan dan pendapatan daerah.

- 3) Seksi pengembangan pendapatan mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan terhadap pendapatan daerah dan potensi pendapatan daerah.
- 4) Seksi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi mengenai pemungutan pajak, dan retribusi daerah lainnya.

e. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan

Sub dinas pendataan dan penetapan mempunyai tugas melakukan pendataan dan pendaftaran pengolahan data dan informasi penetapan dan pemeriksaan.

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Melakukan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah.
- 2) Melakukan pengolahan data dan informasi.
- 3) Malaksanakan penatausahaan penetapan dan berkas wajib pajak.
- 4) Malakukan pemeriksaan, pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan terdiri dari :

- 1) Seksi pendataan dan pendaftaran mempunyai tugas melakukan pendataan wajib pajak dan retribusi daerah, menetapkan nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta melakukan pendaftaran, pemeriksaan, pengawasan objek dan subjek pajak.
- 2) Seksi pengolahan data dan informasi mempunyai tugas melakukan pengolahan data dan meliputi subjek dan objek pajak, data

pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pemungutan daerah lainnya.

- 3) Seksi penetapan mempunyai tugas meakukan usulan penetapan pajak, penerbitan surat ketetapan pajak dan menyiapkan daftar penetapan pajak.
- 4) Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, menyediakan surat, penetapan dan pengawasan subjek dan objek pajak dan retribusi daerah dan serta memeriksa lokasi atau lapangan.

f. Sub Dinas Penagihan

Sub dinas penagihan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi, penagihan dan perhitungan, restitusi dan pemindahan bukuan, pertimbangan dan keberatan.

Sub dinas penagihan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Melakukan pembukuan mengenai penetapan, penerimaan dan pemungutan atau pembayaran atau penyetoran pajak dan retribusi daerah.
- 2) Penatausahaan penerimaan, penagihan, verifikasi, dan penerbitan surat keterangan fiskal.
- 3) Pembukuan piutang pendapatan daerah.
- 4) Restitusi, pemindahan bukuan rekonsikasi.
- 5) Penagihan fasip dan aktip terhadap pajak, retribusi daerah, dan pemungutan daerah lainnya.

Sub Dinas Penagihan terdiri dari:

- 1) Seksi pembukuan dan verifikasi mempunyai tugas melakukan pencatatan surat ketetapan pajak, pembukuan piutang pendapatan daerah dan penetapan tambahan pajak atau retribusi daerah.
- 2) Seksi penagihan dan perhitungan mempunyai tugas melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Seksi retribusi dan pemindah bukuan mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian restitusi dan pemindah bukuan serta rekonsiliasi pendapatan daerah.
- 4) Seksi pertimbangan dan keberatan mempunyai tugas melakukan penerapan peraturan perundang-undangan, memberikan saran dan pertimbangan untuk penyelesaian pengaduan serta pelayanan keberatan terhadap penetapan pajak dan retribusi daerah.

g. Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lain-lain

Sub dinas penerimaan dan pendapatan lain-lain mempunyai tugas melaksanakan tugas penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain, penerimaan BUMD dan pendapatan lain-lain serta legalisasi pembukuan surat-surat berharga.

Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain.

- 2) Mengumpulkan dan mengelolah data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah.
- 3) Melakukan pencatatan penerimaan BUMD dan pendapatan lain-lain.
- 4) Melaksanakan legalisasi atau pengesahan atas surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta melakukan legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga.

Sub Dinas retribusi penerimaan dan pendapatan lain-lain terdiri dari :

- 1) Seksi penerimaan pajak mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak.
- 2) Seksi penerimaan retribusi mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, penerimaan retribusi.
- 3) Seksi penerimaan pendapatan lain-lain mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penerimaan sumber-sumber lain diluar pajak dan retribusi daerah.
- 4) Seksi legalisasi pembukuan surat-surat berharga mempunyai tugas melaksanakan pemberian pengesahan atas surat-surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta menerima dan mencatat permohonan pengadaan serta pendistribusian surat-surat berharga kepada unit kerja yang bersangkutan.

h. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan

Sub dinas bagi hasil pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak, bagi hasil pajak,

bagi hasil bukan pajak dan penyusunan peraturan dan perundang-undangan serta melakukan pengkajian pendapatan.

Sub dinas bagi hasil pendapatan terdiri dari :

- 1) Seksi bagi hasil pajak mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil pajak.
- 2) Seksi bagi hasil bukan pajak mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil bukan pajak.
- 3) Seksi peraturan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan perundang-undangan di bidang pendapatan daerah dan menghimpun berbagai peraturan pendapatan daerah serta melakukan pengkajian peningkatan pendapatan.

i. Cabang Dinas

Cabang dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas, cabang dinas dipimpin oleh kepala cabang dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Cabang dinas mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan unsur teknis operasional.
- 2) Melaksanakan urusan administrasi

Susunan organisasi cabang dinas terdiri dari :

- 1) Kepala cabang dinas
- 2) Unsur staf atau petugas administrasi
- 3) Unsur lini atau petugas teknis operasional

4) Kelompok jabatan fungsional

j. Unit Pelaksana Tehnis Dinas

Unit pelaksana teknis dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas, unit pelaksana teknis dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Unit pelaksana teknis dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas, di satu atau beberapa wilayah kecamatan dalam satu daerah.

Unit pelaksanaan teknis dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya
- 2) Pelaksanaan urusan administrasi

susunan organisasi unit pelaksana teknis dinas terdiri dari :

- 1) Kepala
- 2) Unsur staf atau petugas administrasi
- 3) Unsur lini atau petugas teknis operasional
- 4) Kelompok jabatan fungsional

k. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional dalam lingkup dinas daerah dinas gas melakukan kegiatan teknis dinas sesuai di bidang keahlian masing-masing, kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan atau kepala unit pelaksana teknis dinas yang bersangkutan. Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin

oleh seorang tenaga fungsional senior. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

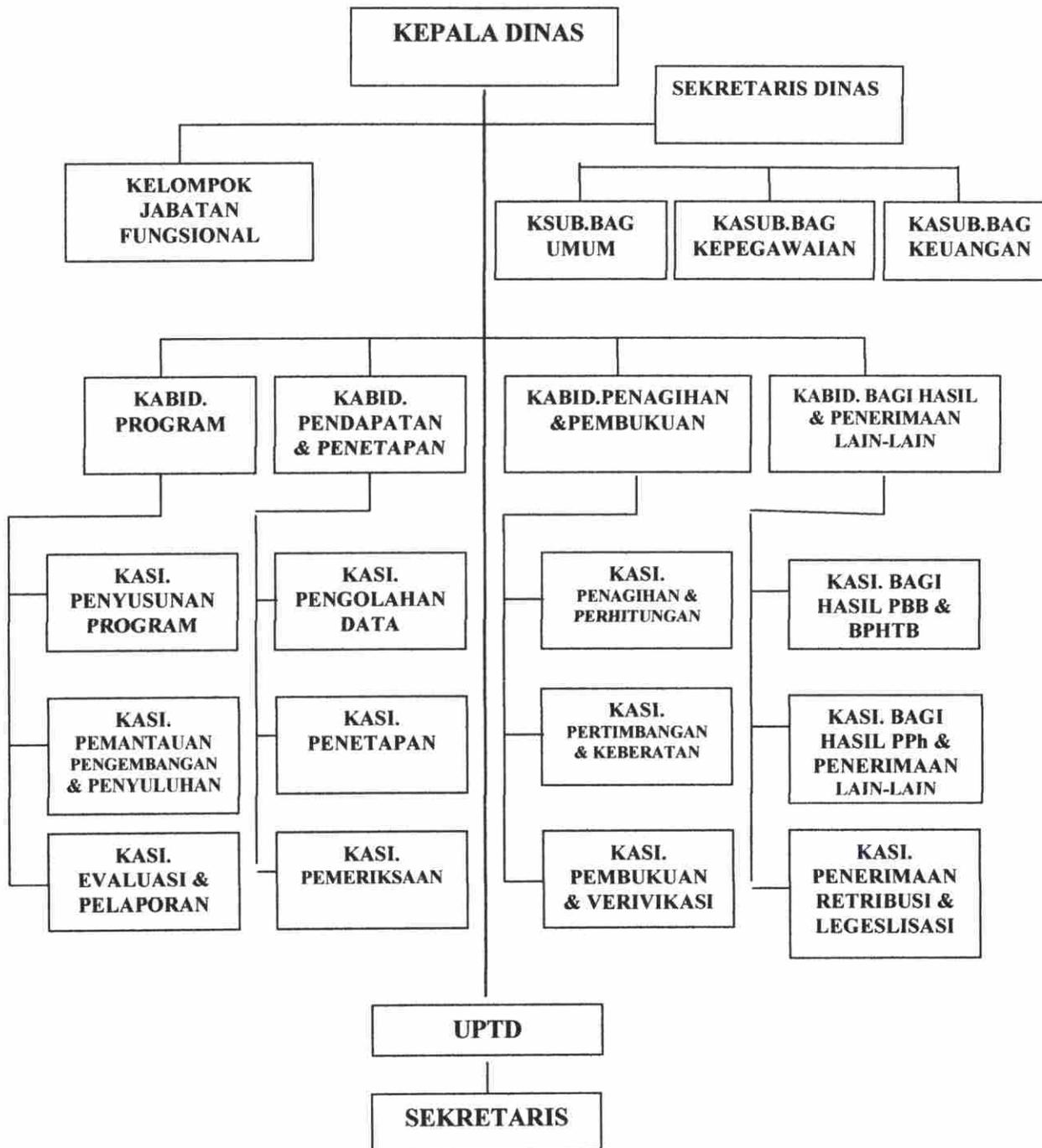
3. Aktivitas Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Berdasarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2001 tentang tugas dinas daerah dijelaskan bahwa tugas pokok dari Diaspenda Kota Palembang adalah sebagai unsur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, penetapanm pelaksanaan, dan pengendalian peningkatan pendapatan daerah khususnya pada Kota Palembang.

Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang:

- a. Melakukan perumusan kebijakan teknis , pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis bidang pemungutan pendapatan daerah yang berlaku.
- b. Melakukan pemugutan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Koordinasi teknis pemungutan seluruh usaha dibidang pemungutan retribusi daerah dan pemungutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. pelaksana teknis administrasi.

Gambar IV.1
Struktur Organisasi



Sumber : Dispenda Kota Palembang, 2012

Struktur organisasi menunjukkan tentang struktur dan tanggung jawab serta wewenang secara formal pada setiap fungsi organisasi adalah proses berstruktur, tempat orang berorientasi untuk mencapai tujuan organisasi, sedangkan untuk menunjukkan tugas dan wewenang atau tanggung jawab dari masing-masing pegawai atau tidak saling tumpang tindih, diperlukan suatu struktur organisasi. Struktur organisasi melukiskan interaksi kegiatan, peranan, hubungan, tujuan dan sifat-sifat organisasi lainnya, tetapi diingat juga bahwa peranan struktur pada setiap jenis organisasi ternyata berlainan dalam tingkat dan kualitasnya.

Lazimnya struktur organisasi yang berstruktur dari jumlah kotak-kotak yang digabungkan bersama struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, struktur ini menganut sistem organisasi garis atau line karena adanya ketentuan dalam kepemimpinan yang pada akhirnya diharapkan kedisiplinan kerja lebih terjamin dan dapat diinvestarisasikan secara efektif dan efisien. Adapun organisasi garis ini wewenang puncak pimpinan mengatur bagian-bagian yang ada dibawahnya secara langsung sehingga dapat mempermudah tujuan organisasi.

4. Tugas Pokok Visi, Misi dan Sasaran Organisasi

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sesuai dengan keputusan Walikota Palembang tentang pelaksanaan peraturan daerah Kota Palembang No 2 tahun 2001 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dinas daerah menugaskan kepada :

- a) Sekretaris Daerah Kota
- b) Kepala Dinas Pertanian
- c) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- d) Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah
- e) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- f) Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja
- g) Kepala Dinas Dinas Kesehatan
- h) Kepala Dinas Pendidikan Nasional
- i) Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial
- j) Kepala Dinas Tata Kota
- k) Kepala Dinas Pertanahan
- l) Kepala Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah
- m) Kepala Dinas Kebersihan Dan Keindahan Kota
- n) Kepala Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran
- o) Kepala Dinas Pasar
- p) Kepala Dinas Perhubungan
- q) Kepala Dinas Pendapatan Daerah
- r) Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
- s) Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi
- t) Kepala Dinas Polisi Pamong Praja
- u) Kepala Bagian Kepegawaian
- v) Kepala Bagian Umum Dan Perlengkapan
- w) Kepala Bagian Hukum, Organisasi Dan Tatalaksana

Untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah Kota Palembang No 2 tahun 2001 tentang pembentukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi dinas daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertugas melakukan pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain Kota Palembang, dan melakukan koordinasi dengan Dinas-dinas atau Instansi pemungut pendapatan daerah dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

a. Visi dan Misi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang pada visi, misi tujuan dan sasaran organisasi, yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1) Visi

Mewujudkan pendapatan asli daerah sebagai potensi utama mendukung kegiatan pembangunan otonomi daerah yang bersatu teguh.

2) Misi

- a) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
- b) Meningkatkan motivasi kepada masyarakat terhadap upaya pembangunan melalui pembayaran pajak daerah dan etribusi daerah.
- c) Penggalian sumber-sumber penerimaan baru.
- d) Meningkatkan pendapatan daerah

b. Tujuan dan Sasaran

perumusan dalam penetapan tujuan dan sasaran merupakan hasil kajian yang dilakukan dari misi, dan sebagai arah dalam upaya mencapai visi sebagaimana yang telah ditetapkan. Dalam rangka mencapai misi sebagaimana yang telah dikemukakan maka rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1) Tujuan

- a) Terwujudnya pendapatan daerah sebagai potensi utama dalam pembangunan daerah.
- b) Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang berkesinambungan secara prima dan tepat waktu.
- c) Terciptanya budaya masyarakat yang sadar terhadap hak dan kewajiban dibidang pajak dan retribusi daerah.
- d) Berkembangnya sumber daya manusia dibidang pelayanan secara professional.
- e) Terciptanya organisasi yang berorientasi ke masa depan.

2) Sasaran

- a) Meningkatkan pendapatan daerah.
- b) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah.
- c) Meningkatkan kualitas aparat pelayanan.
- d) Meningkatkan sarana dan prasarana operasional pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- e) Tersedianya sistem pelayanan komputerisasi.

- f) Meningkatnya kerja sama dengan pihak ketiga.
- g) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
- h) Meningkatkan operasional pemungutan melalui pemberdayaan masyarakat.
- i) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target retribusi daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Dalam pembahasan ini ada beberapa faktor yang menyebabkan penerimaan pemerintah dari sektor retribusi tidak pernah tercapai sehingga pemerintah tidak dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, Sebagai asumsi dan perbandingan dalam pencapaian target dan realisasi penerimaan retribusi daerah selama 4 tahun (2007-2010) dapat digambarkan berdasarkan tabel berikut ini retribusi apa yang mengalami tidak tercapai targetnya selama 4 tahun terakhir.

a. Penerimaan Target Belum Realistis

Target merupakan tujuan spesifik dan unik yang hendak dicapai, yang dapat bersifat finansial dan non finansial. Penerimaan target yang diterima dari sumber pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan retribusi khususnya di kota Palembang masih belum realistis, hal ini dapat dikatakan karena penerimaan target retribusi yang telah ditetapkan pemerintah dari tahun-ketahun tidak pernah tercapai, sehingga hal ini

dapat dikatakan pencapaian target belum realistis, dengan melihat potensi yang sangat banyak dan luas dari daerah itu sendiri.

Penerimaan target yang di terima oleh Dinas Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber retribusi yang di kumpulkan pihak dinas-dinas terkait lainnya dikatakan belum realistis, karena target yang telah ditetapkan tidak dapat terealisasi tiap tahunnya, dan kebocoran yang terjadi pada setiap jenis retribusi yang diterima dapat mengurangi pendapatan daerah dan menghambat proses pembangunan daerah yang nyata dan dinamis, oleh karena itu pihak dinas pendapatan daerah harus memperhatikan secara realistis tentang pemungutan dan pengumpulan sumber retribusi dengan baik.

Menurut penulis untuk sebaiknya langkah yang harus diperhatikan oleh pemerintah yaitu dengan cara memperhatikan sumber penerimaan daerah dengan cara memberikan perhatian khusus untuk menentukan apa saja yang dapat menjadi sumber pendapatan atau penerimaan daerah, agar penerimaan yang di peroleh daerah lebih baik lagi untuk kelangsungan pembangunan dan perbaikan daerah yang masih belum memadai.

b. Penentuan Target Retribusi Didasarkan Pada Data Historis

Menurut hasil wawancara pada bagian umum dan administrasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang mengatakan masih banyak kelemahan dalam penentuan target retribusi yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah, karena target penerimaan retribusi ini bukan ditetapkan

oleh Dinas Pendapatan Daerah melainkan ditetapkan oleh masing-masing instansi yang memungut retribusi tersebut. Sehingga Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang tidak dapat menentukan berapa besar masing-masing Instansi Pemerintah yang memungut retribusi, dan mengakibatkan masih banyaknya jenis jenis retribusi yang tidak mencapai target dan mengalami penurunan tiap tahunnya.

Cara penyusunan realisasi data historis bersifat *incrementalism* yang harus menambah serta mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai alasan untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan dan pengukuran kinerja yang digunakan selama ini oleh dinas-dinas Kota Palembang. Pendekatan semacam ini tidak saja menjamin terpenuhnya kebutuhan namun juga dapat mengakibatkan kesalahan yang berlanjut. Hal ini disebabkan karena tidak pernah tahu apakah pengeluaran periode sebelumnya yang dijadikan dasar penyusunan anggaran penyusunan anggaran tahun ini tidak didasarkan atas kebutuhan yang wajar. Masalah utama anggaran adalah terkait dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep *value for money*. Ini sering kali tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional yang tidak ada perhatian pada konsep ini sering kali pada akhir tahun terjadi kelebihan anggaran yang sebenarnya kurang penting untuk dilaksanakan.

Penentuan target seperti yang dilakukan oleh dinas kebersihan yaitu dengan pendekatan realisasi data historis tradisional dengan hanya

menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item target retribusi kebersihan yang sudah ada sebelumnya, dengan menggunakan data dari tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan dan melihat perkembangan retribusi aneka usaha. Penggunaan pendekatan realisasi data historis tidak memungkinkan untuk dilakukannya penilaian kinerja secara akurat, karena satu-satunya tolak ukur yang digunakan adalah semata-mata pada ketaatan dalam menambah dan mengurangi retribusi yang ada sebelumnya, sentralisasi penyiapan anggaran ditambah informasi yang tidak memadai akan menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran.

Menurut penulis untuk menentukan besarnya target retribusi tidak hanya melihat dari historis, tetapi harus melihat aspek ekonomis yaitu dengan melihat dan memperhatikan kemampuan masyarakat dalam membayar retribusi, efisiensi sering dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional. Pada konsep ini sering kali pada akhir tahun terjadi kelebihan anggaran yang mengalokasikan kemudian dipaksakan pada aktivitas yang sebenarnya kurang penting untuk dilaksanakan, efektifitas yaitu dilihat dari kinerja yang ada apakah sudah optimal atau belum misalnya pengeluaran periode sebelumnya yang dijadikan dasar penyusunan anggaran tahun ini tidak didasarkan atas kebutuhan yang wajar karena dana tersebut akan digunakan oleh pemerintah Kota Palembang dalam menjalankan perekonomian dan

pembangunan baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang

c. Masih Tingginya Tingkat Kebocoran

Kebocoran atau kelolosan penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari penerimaan retribusi dapat berakibat tidak primanya layanan dan pembangunan di suatu daerah. Kebocoran penerimaan sumber pendapat daerah dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri untuk membayar retribusi, sehingga pemerintah dituntut untuk mensosialisasikan kepada masyarakat.

Kebocoran atau kelolosan penerimaan sumber daerah banyak terjadi dalam pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah, selain masyarakat yang bersifat apatisme, ketidakpercayaan yang dikarenakan tidak melihat perbaikan dan pelayanan yang memadai oleh pemerintah daerah, dari pihak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab juga menjadi penyebab bocornya penerimaan sumber daerah ini.

Menurut penulis sebaiknya langkah yang harus diperhatikan oleh pemerintah yaitu dengan cara menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dan mencegah kebocoran dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan, serta pengadaan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa

pentingnya retribusi sebagai sumber penerimaan untuk pembangunan daerah.

d. Efektifitas Pemberlakuan Sanksi

Efektifitas adalah hubungan antara keluaran dan tujuan atau sarana yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan dapat mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan, penerimaan retribusi daerah pada kegiatan intensifikasi masih dituntut untuk dilakukan penegakan hukum atau kelalaian yang dilakukan wajib retribusi.

Berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2006 menyatakan bahwa :

- 1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 9, 10, dan 11 mengenai perizinan dan pasal 7 tentang tarif retribusi maka akan diancam pidana kurungan 3 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Tindak pidana yang dimaksud ayat 1 pasal ini adalah pelanggaran.

Menurut penulis untuk dapat secara optimal mengenakan sanksi kepada wajib retribusi, pihak instansi-instansi yang memungut retribusi harus memberikan sanksi yang tegas bagi wajib retribusi yang tidak membayar atau tidak membayar tepat pada waktunya. Sanksi tersebut dapat berupa surat peringatan / teguran, itu bisa dapat terjadi secara lisan maupun tertulis. Jika dalam beberapa waktu tidak ada respon, sesuai

dengan pasal 7 tentang tarif retribusi maka akan diancam pidana kurungan 3 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

e. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan merupakan salah satu kendala yang dihadapi. Menurut hasil wawancara kepada pihak bagian penerimaan retribusi pada Dinas Perhubungan Kota Palembang misalnya sarana dan prasarana terminal yang di kelola oleh dinas perhubungan, masih kurangnya kelengkapan mengenai rambu-rambu yang jelas serta fasilitas yang nyaman bagi pengemudi, sehingga sering kali hal ini mengakibatkan terjadi pelanggaran dan kelalaian, dan berakibat terjadinya kebocoran PAD, yang bersumber dari retribusi terminal. Bila ada penambahan sarana yang diberikan masih kurang signifikan dengan jumlah kebutuhan yang diperlukan.

Menurut penulis langkah yang perlu ditempuh untuk meningkatkan sarana dan prasarana yaitu dengan menambah sarana dan prasarana yang cukup dan memadai untuk menanggulangi permasalahan yang sering terjadi, dan sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan publik untuk mendapatkan fasilitas yang lebih baik, sehingga pelayanan dan sarana yang di berikan oleh publik dapat di nikmati dan dirasakan manfaatnya oleh pengguna fasilitas yang di berikan tersebut.

f. Belum Primanya layanan dan pengawasan Tingkat Pelayanan

Pelayanan merupakan salah satu usaha yang harus dikedepankan. Untuk sementara ini pelayanan yang diberikan oleh dinas-dinas pemerintah kota Palembang belum baik, karena banyaknya atau masih adanya keluhan-keluhan dari masyarakat. Langkah awal untuk mencapai hasil tersebut adalah melakukan penanganan secara optimal oleh petugas retribusi atau instansi-instansi yang terkait dalam hal melayani kebutuhan masyarakat dengan fasilitas dan kenyamanan yang sebaik-baiknya.

Pengawasan merupakan tingkatan manajemen yang meliputi kegiatan, pengujian, dan pemantauan serta kunjungan staf untuk menjaga agar tugas pokok dan fungsi departemen dapat dilaksanakan berdaya guna, berhasil guna, dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan rencana yang ditetapkan sehingga kegiatan dan tujuan organisasi dapat dicapai.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada Staf bagian penerimaan retribusi dan legeslisasi pada Dinas Pendapatan Daerah mengatakan bahwa Pemerintah Kota Palembang telah melakukan usaha untuk menghindari adanya kebocoran dan kelolosan. Kebocoran dan kelolosan ini berupa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum pegawai pemerintah demi kepentingan pribadi mereka.

Menurut penulis sebaiknya pemerintah bertindak tegas terhadap oknum yang menyalahgunakan tugasnya sebagai pemungut retribusi agar diberi sanksi sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan baik sanksi ringan berupa teguran maupun sanksi berat berupa pemecatan.

g. Sumber Daya Manusia

Dalam setiap instansi membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik. Kurangnya kemampuan dan kualitas sumber daya manusia yang rendah berakibat penerimaan yang tidak optimal. Dari segi pendidikan masih banyak pegawai retribusi yang lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga tidak menjalankan tugasnya dengan benar karena mereka belum mengetahui dan mengerti tentang pekerjaannya dan juga pengalaman yang belum luas tentang retribusi. Berdasar hasil wawancara pada pihak Dinas Pendapatan daerah Kota Palembang menyatakan bahwa Dengan adanya sumber daya manusia yang kurang memadai dan berkualitas terutama bagian operasional lapangan dapat mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi.

Dalam hal ini perlu dilakukan pelatihan-pelatihan seperti peningkatan basis formal dan pendidikan informal dan memberikan pengenalan alat teknologi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar peningkatan aparat retribusi sehingga dapat meningkatkan penerimaan retribusi yang ditargetkan oleh pemerintah kota Palembang.

Tabel IV.1
Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Palembang Tahun 2007

No	Jenis-jenis retribusi	Target	Realisasi	%
1.	Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat	225.000.000	117.600.000	52,27
2.	Retribusi parkir ditepi jalan umum	3.250.000.000	1.852.068.000	56,99
3.	Retribusi terminal	2.000.000.000	1.214.690.850	60,73
4.	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	2.750.000.000	2.751.743.260	100,06
5.	Retribusi penggantian biaya cetak peta	200.000.000	102.610.000	51,31
6.	Retribusi pengolahan limbah cair	587.157.455	513.314.970	87,42
7.	Retribusi persampahan dan kebersihan	3.000.000.000	1.926.020.000	64,20
8.	Retribusi usaha salon dan kecantikan	12.000.000	12.760.000	106,33
Jumlah		13.024.157.455	8.490.807.080	65,19

Sumber : Dispenda Kota Palembang, 2011

Tabel IV.2
Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Palembang Tahun 2008

No	Jenis-jenis retribusi	Target	Realisasi	%
1.	Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat	210.000.000	184.000.000	87,62
2.	Retribusi parkir ditepi jalan umum	3.500.000.000	2.386.138.700	68,18
3.	Retribusi terminal	2.250.000.000	1.239.446.700	55,09
4.	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	3.250.000.000	3.037.445.220	93,46
5.	Retribusi penggantian biaya cetak peta	200.000.000	117.535.000	58,77
6.	Retribusi pengolahan limbah cair	662.157.455	622.292.396	93,98
7.	Retribusi persampahan dan kebersihan	3.547.761.000	2.414.846.000	68,07
8.	Retribusi usaha salon dan kecantikan	20.000.000	16.900.000	84,50
Jumlah		13.639.918.455	10.018.604.016	73,45

Sumber : Dispenda Kota Palembang 2011

Tabel IV.3
Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Palembang Tahun 2009

No	Jenis-jenis retribusi	Target	Realisasi	%
1.	Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat	272.316.543	201.150.000	73,87
2.	Retribusi parkir ditepi jalan umum	5.500.000.000	3.382.888.650	61,51
3.	Retribusi terminal	2.500.000.000	1.379.046.450	55,16
4.	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	4.000.000.000	2.948.178.500	73,70
5.	Retribusi penggantian biaya cetak peta	200.000.000	115.645.000	57,82
6.	Retribusi pengolahan limbah cair	662.157.455	444.432.602	67,12
7.	Retribusi persampahan dan kebersihan	3.716.702.000	2.921.347.600	78,60
8.	Retribusi usaha salon dan kecantikan	31.956.000	33.896.500	106,07
Jumlah		16.881.131.998	11.426.585.302	67,68

Sumber : Dispenda Kota Palembang, 2011

Tabel IV.4
Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Palembang Tahun 2010

No	Jenis-jenis retribusi	Target	Realisasi	%
1.	Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat	272.316.543	162.500.000	59,67
2.	Retribusi parkir ditepi jalan umum	5.500.000.000	3.590.938.000	65,29
3.	Retribusi terminal	2.500.000.000	1.413.272.750	56,53
4.	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	4.000.000.000	3.094.073.180	77,35
5.	Retribusi penggantian biaya cetak peta	225.000.000	113.485.000	50,44
6.	Retribusi pengolahan limbah cair	662.157.455	616.710.647	93,14
7.	Retribusi persampahan dan kebersihan	3.772.452.530	3.141.195.100	83,27
8.	Retribusi usaha salon dan kecantikan	40.000.000	30.924.500	77,31
Jumlah		16.971.925.528	12.163.099.177	71,66

Sumber : Dispenda Kota Palembang, 2011

1. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dari tahun ke tahun target yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak pernah tercapai, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar retribusi kepada instansi yang terkait didalam pelayanan pengabuan. biasanya keluarga yang berduka tersebut lalai untuk membayar retribusi karena kurang pengawasan juga dari instansi yang berperan di dalam pemungutan retribusi tersebut, sehingga menyebabkan kurang tercapainya target.

2. Retribusi parkir ditepi jalan umum

Target yang ditetapkan oleh pihak dinas atau instansi tidak dapat terealisasi sepenuhnya. Pihak dinas yang mengelola retribusi ini telah mengelola pemungutan retribusi dengan baik, namun dapat dilihat salah satu faktor lingkungan yang menunjukkan masih banyaknya parkir liar yang dikelola perorangan, dan hal inilah yang menjadikan potensi kebocoran. Pengelolaan retribusi parkir ditepi jalan umum sangat sulit di tertibkan dan kesadaran masyarakat untuk parkir ditempat yang aman juga masih sangat rendah. Faktor yang sangat mempengaruhi penurunan retribusi ini yang dituturkan oleh bagian dinas yang mengelola khusus untuk parkir belum adanya lahan parkir yang representif, sehingga mengakibatkan pengawasan yang kurang efektif sering menjadi faktor penyebab turunnya penerimaan retribusi daerah.

3. Retribusi terminal

Tidak terealisasinya target penerimaan retribusi terminal karena faktor kurangnya pengawasan yang ketat oleh dinas yang terkait, terutama dalam proses pemungutan retribusi di lapangan. Banyaknya angkutan yang ada di Kota Palembang yang masih tidak mengikuti aturan, dan kelalaian pengawasan petugas lapangan dinas yang sering menjadi faktor utamanya yaitu MPU dan Bus AKDP yang tidak masuk kedalam terminal, sehingga terjadi kebocoran PAD yang bersumber dari retribusi terminal, seperti yang terlihat di lapangan, beberapa MPU dan Bus terlihat menurunkan dan menaikkan penumpang tidak di dalam terminal melainkan di pintu keluar dan sekitar terminal, hal ini juga didorong karena dalam bidang sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah masih sangat kurang yaitu dapat berupa rambu-rambu yang jelas disekitar terminal, sehingga pihak dinas perhubungan belum memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan tindakan.

4. Retribusi pengujian kendaraan bermotor

Target penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor tidak mencapai target, hal ini karena banyaknya kendaraan kota seperti angkutan umum yang sudah tidak layak atau masa operasi yang benar-benar sudah tidak dapat dijalankan, dan tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak dinas yang berkaitan. Tidak dapat beroperasinya kendaraan yang menjadi salah

satu sumber retribusi daerah ini mengakibatkan kurangnya pencapaian pemungutan terhadap retribusi pangujian kendaraan bermotor.

5. Retribusi penggantian biaya cetak peta

Target penerimaan retribusi penggantian biaya cetak tidak terealisasi sepenuhnya, hal ini karena faktor pengeloannya yang kurang optimal dan kurangnya kesadaran dari masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas yang kurang disiplin instansi yang bertanggungjawab didalam pengawasan, apabila pengendalian berjalan dengan baik maka tertib kerja akan berjalan sehingga timbul keharmonisan dan keserasian maupun saling pengertian antar masyarakat dalam menunjang terealisasinya retribusi ini.

6. Retribusi pengolahan limbah cair

Retribusi jasa usaha pegelolaan limbah cair tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah, hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi yang baik didalam lembaga tersebut sehingga tidak adanya kerjasamam yang baik dengan Dinas pendapatan daerah didalam penetapan target retribusi jasa usaha pengolahan limbah cai tersebut.

7. Retribusi persampahan dan kebersihan

Retribusi persampahan dan kebersihan mengalami penurunan disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap retribusi tersebut, dan banyaknya bak sampah yang disediakan oleh pemerintah di

setiap tempat membuat masyarakat merasa dapat membuang sendiri sampah ke bak sampah yang disediakan oleh pemerintah tersebut tanpa menggunakan jasa pengangkutan sampah yang menggunakan gerobak sampah. Maka dari itu pemerintah harus efektif mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dan meyakinkan masyarakat akan pentingnya retribusi ini karena sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.

8. Retribusi usaha salon dan kecantikan

Target penerimaan retribusi usaha salon dan kecantikan mengalami penurunan. dalam perencanaan penetapan jumlah target pihak manajemen retribusi menyiapkan penentuan yang meliputi daftar wajib retribusi yang memiliki usaha, pendataan, penyetoran, pembukuan sampai dengan melaporkan jumlah wajib retribusi usaha yang telah memiliki nomor pokok wajib bayar. Hal ini merupakan inti dari sistem pengelolaan retribusi usaha industri yang melibatkan sub unit pengelolaan keuangan. Antara lain penyebab tidak tercapainya target disebabkan dari data banyak usaha salon dan kecantikan yang tidak memiliki nomor pokok wajib bayar retribusi di beberapa tempat, dan hal ini salah satu kebocoran penerimaan pendapatan asli daerah.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis lakukan faktor-faktor tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah sebagai berikut :

1. Penentuan Target Retribusi Daerah

Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh dinas dengan pendekatan realisasi data tradisional dan historis.

2. Efektifitas Pembelian Sanksi

Pemberlakuan sanksi tentang retribusi harus diperhatikan sebab memberikan dasar hukum yang mengikat masyarakat.

3. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan merupakan salah satu kendala yang dihadapi.

4. Tingkat Pelayanan

Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu usaha yang dikedepakan,

5. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang kurang memadai dan berkualitas yang tidak memahami tentang retribusi.

6. Kurangnya Pengawasan

Pengawasan terhadap koordinasi telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang tetapi masih kurang baik karena tidak adanya komunikasi mengenai informasi-informasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang penulis uraikan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah pada Pemerintah Kota Palembang khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang diharapkan memperhatikan beberapa tindakan untuk mengurangi kebocoran pendapatan asli daerah yang bersumber dari daerah Kota Palembang sendiri, yaitu

1. Memperhatikan perencanaan penyusunan retribusi daerah dengan tidak hanya melihat dari data historis saja.
2. Mengoptimalkan sanksi kepada wajib retribusi.
3. Meningkatkan penerimaan dengan melakukan perbaikan serta menambah saran dan prasarana yang memadai.
4. Melakukan pelatihan program pendidikan kepegawaian.
5. Meningkatkan pengawasan bagian lapangan.
6. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar menyadari retribusi daerah sebagai salah satu sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2000. **Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Abdul Halim. 2007. **Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah**, Edisi Revisi, penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Indra Bastian dan Gatot Supriyanto. 2003. **Sistem Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. **Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Martini Anggraini. 2006. **Analisis Penerimaan Retribusi Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banyuasin**, FE-UMP, Skripsi tidak dipublikasikan.
- Nan Lin Alih Bahasa W. Gulo. 2002. **Metode Penelitian**, penerbit PT Grafindo, Jakarta.
- Nur Indiantoro dan Bambang Supomo. 2003. **Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen**, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001, Tentang **Retribusi Daerah**.
- Sugiyono. 2002. **Metode Penelitian Bisnis**, penerbit Alfabeta, Bandung.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang **Pemerintah Daerah**.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**.



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Merdeka No.21 Palembang, Propinsi Sumatera Selatan
Telepon(0711)352282 Faximili(0711)317393 Kode Pos, 30132
E-Mail : Kepala@dispenda.palembang.go.id Website : wwdispenda.palembang.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 070 / 171 /PENDA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. H. Bukman Lian, MM, M.Si

J a b a t a n : Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Menerangkan bahwa :

Nama : Aswati

Nim : 22 2008 049

Jurusan : Akuntansi

Telah melaksanakan Pengambilan Data pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang terhitung tanggal 26 Oktober s.d 25 Nopember 2011.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Palembang, 14 Februari 2012

a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kota Palembang
Sekretaris,



Drs. H. Bukman Lian, MM, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 195807161979121002



KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Aswati	PEMBIMBING
NIM : 22 2008 049	KETUA : Muhammad Fahmi, S.E, M.Si
JURUSAN : AKUNTANSI	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENURUNAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	5 Januari 2012	Revisi, 43	h		ok
2	12 Januari 2012	det	h		Revisi
3	21 Januari 2012	det, wawancara	h		Revisi
4	2 Februari 2012	DU.	h		Revisi
5	11 Februari 2012	analisa.	h		Revisi
6	14 Februari 2012	ok.			Acc
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluarkan di : Palembang
Pada tanggal : 16 / 02 / 2012

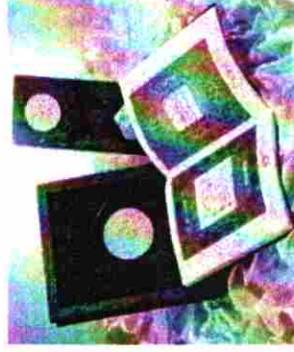
Dekan
Ketua Jurusan,



Drs. Sunardi, S.E, M.Si



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DIBERIKAN KEPADA :

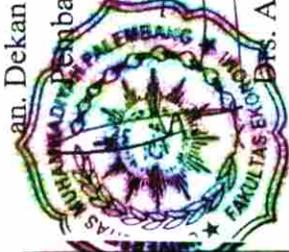
NAMA : ASWATI
NIM : 222008049
JURUSAN : Akuntansi

Yang dinyatakan LULUS Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat MEMUASKAN

Palembang, 20 April 2011

an. Dekan

Pembantu Dekan IV



Drs. Antoni

Unggul dan Islami



ECONOMICS FACULTY
UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LANGUAGE INSTITUTE & CAREER
 Jl. Ahmad Yani - 14 Ulu Palembang
 Telp. 0711.511433
 e-mail: lbpk_feump@yahoo.com

TOEFL PREDICTION TEST	
FULL NAME	ASWATI
TIME TAKEN	08.00-10.00 AM

SEX	DATE OF BIRTH	TEST DATE
M/F	D/M/Y	D/M/Y
F	1-Nov-1990	29-Jan-2012

TOEFL PREDICTION SCORES			
SECTION 1	SECTION 2	SECTION 3	TOTAL SCORE
46	40	43	430

EXAMINEE'S NUMBER	1249
--------------------------	------

[Signature]

Prof. Dr. Indawan Syahri, M.Pd.
 Consultant

DATE OF REPORT	07/02/2012
-----------------------	------------

[Signature]
Muhammad Fauzi, S.E., M.Si
 CHAIRMAN

When properly signed, this report certifies that the candidate whose name appears above has taken the TOEFL prediction Test of Economics faculty - language institute & career under secure conditions. This score is valid for only six months. This report is confidential



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN

JURUSAN MANAJEMEN (11)
 JURUSAN AKUNTANSI (15)
 MANAJEMEN PERUSAHAAN (16)

IZIN PENYELENGGARAAN

No. 0613/D/TK/026/12
 No. 0620/D/TK/026/12
 No. 0613/D/TK/026/12

AKREDITASI

No. 019/SAN-PTIA-XI/S1/WIR/2008 (15)
 No. 044/SAN-PTIA-XI/S1/P2011 (15)
 No. 019/SAN-PTIA-XI/Dg/01-01-2011 (18)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 113 Ulu (0711) 511-1111 Faksimil: 10711, 518016 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Kamis, 01 Maret 2012
 Waktu : 08.00 Wib s.d Selesai
 Nama : Aswati
 NIM : 22 2008 049
 Program Studi : Akuntansi
 Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
 Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI SEHINGGA DIPERKENANKAN UNTUK MENDAFTAR WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Muhammad Fahmi, S.E., M.Si	Pembimbing	01-03-2012	
2	Hj. Yuhanis Ladewi, S.E., Ak., M.Si	Ketua Penguji	4-03-2012	
3	Aprianto, S.E., M.Si	Anggota Penguji I	6/03/2012	
4	Muhammad Fahmi, S.E., M.Si	Anggota Penguji II	6/3 2012.	

Palembang, Maret 2012
 An. Dekan
 Ketua Program Studi Akuntansi

Drs. Sunardi, S.E, M.Si
 NIDN : 0206046303

BIODATA PENULIS

Nama : Aswati

Tempat / Tanggal lahir : Duri Riau / 07 November 1990

Pendidikan : - TK Pertiwi Duri Riau
- SD Negeri 12 Duri Riau
- SLTP Negeri 08 Duri Riau
- SMA PGRI Prabumulih

Alamat : Jl. Tangkuban Perahu Gang Larona Prabumulih

No telp : 085268576196

Pekerjaan : Mahasiswi

Nama orang tua

 Ayah : Suharto

 Ibu : Muryati

Pekerjaan orang tua

 Ayah : Wiraswasta

 Ibu : Ibu rumah tangga

Alamat orang tua : Jl. Tangkuban Perahu Gang Larona Prabumulih

Palembang, Februari 2012

Penulis



(Aswati)